

Perspektif *Community Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Laura Octavia, Rina Herlina Haryanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
email : lauraoctv1@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam perspektif *community governance* oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronaadi Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik validitas data dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi menggunakan teknik analisis data model Miles, Hubberman, and Saldana (2014). Penelitian ini menggunakan teori tiga tahapan pemberdayaan masyarakat tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaaan. Masing-masing sudah memberikan pemberdayaan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilihat dari ketiga tahapan dalam perspektif *community governance* meliputi aspek-aspek *community governance* seperti *social capital* melalui tujuan untuk keberhasilan penyandang disabilitas berupa (*bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*), *organizational resources* berupa tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya organisasi untuk pemenuhan pemberdayaan. Sayangnya pada *human capital*, kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki KSM Sambung Roso masih terbatas untuk proses pemenuhan kemampuan dan keahlian dari beberapa anggota pendamping KSM Sambung Roso belum dilaksanakan secara kuat.

Kata Kunci: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas, *Community Governance*, Penyandang Disabilitas

Abstract

This study aims to examine the process of empowering people with disabilities in the perspective of *community governance* by the Self-Help Group (KSM) Sambung Roso Simbatan, Nguntoronaadi District, Magetan Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data validity technique in this study was through source triangulation. The data obtained was analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification using data analysis techniques modeled by Miles, Hubberman, and Saldana (2014). This study uses the theory of three stages of community empowerment, the awareness stage, the capacity building stage, and the empowerment stage. Each of them has provided good empowerment. The results of the study show that the process of community empowerment activities for persons with disabilities seen from the three stages in the perspective of *community governance* includes

aspects of community governance such as social capital through goals for the success of persons with disabilities in the form of bonding social capital, bridging social capital, and linking social capital, organizational resources in the form of the availability of human resources and organizational resources for the fulfillment of empowerment. Unfortunately in terms of human capital, the capabilities and expertise of the human resources owned by KSM Kontak Roso are still limited to the process of fulfilling the abilities and expertise of several members of the KSM Kontak Roso companions which have not been implemented strongly.

Keywords: Community Self-Help Groups (KSM), Community Empowerment, Capacity, Community Governance, Persons with Disabilities

Pendahuluan

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2021, menyatakan bahwa di dunia terdapat 7 miliar jumlah penduduk dengan sebanyak 15% adalah penyandang disabilitas (indonesia.go.id.). Dilansir dari Antaranews.com, menyatakan bahwa di kawasan ASEAN tercatat sebanyak 62 juta penyandang disabilitas. Indonesia salah satu negara dengan disabilitas tertinggi, yaitu 27.900.000 penyandang disabilitas atau setara dengan 45% penyandang disabilitas yang terletak di kawasan ASEAN. Di sisi lain, persebaran setiap provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur menempati posisi ke-2 sebagai salah satu provinsi dengan penduduk disabilitas terbanyak (Yudistia, 2022). Hal ini sama dengan data di provinsi Jawa Timur bahwa terdapat jumlah penyandang disabilitas sebanyak 69,299 juta yang terdata di Jawa Timur (Gubernur Jatim, 2022). Menurut ILO (*International Labour Organization*) penyandang disabilitas sangat tinggi keberadaannya di negara-negara berkembang, serta memiliki keterbatasan dalam mendapatkan hak akses kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan penyandang disabilitas (ILO, 2013). Permasalahan penyandang disabilitas berlanjut tentang masalah hak asasi manusia, dalam mendapatkan perawatan kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan seringkali dikucilkan atau tidak dianggap keberadaannya (Charlton, 2000). Dalam implementasi di pasar tenaga kerja penyandang disabilitas mengalami kesenjangan untuk mendapatkan hak yang sama (Berlinski et al., 2021).

Kesenjangan ketenagakerjaan untuk para penyandang disabilitas juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni “*no one left behind*” atau jangan sampai ada yang tertinggal (*United Nations*, 2015). Permasalahan dalam dunia kerja untuk disabilitas salah satunya, karena adanya pihak keluarga yang menyembunyikan identitas anggota keluarga dengan disabilitas, sehingga peran dunia kerja belum maksimal karena disabilitas sulit melakukan hak akses untuk berkembang (Diono, 2014). Hal ini, mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang miskin dan beresiko menjadi pengangguran karena tidak responsif untuk mencari pekerjaan (Sheppard-Jones & Lasley-Bibbs, 2021). Di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur pelaksanaan rekrutmen calon pekerja dan jumlah minimal disabilitas yang harus diterima perusahaan serta perlindungan hak dalam bekerja, disisi lain peraturan yang dilakukan belum mampu membawa Indonesia pada hak penyandang disabilitas yang baik. Adapun itu, karakteristik dari lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi bagaimana penyandang disabilitas berkembang dan menghasilkan ekonomi (Brucker et al., 2015 dalam Gilroy et al., 2020).

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberdayaan penyandang disabilitas. Dikarenakan pemberdayaan sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, sejalan dengan pernyataan Susilawati (2016: 231) pemberdayaan berguna untuk kesejahteraan masyarakat rentan atau disabilitas, yang mana komunitas mengarahkan pada suatu hal yang memberikan kemakmuran. Sayangnya, dalam melakukan pemberdayaan tidak sepenuhnya berjalan berhasil, seperti fenomena pemberdayaan penyandang disabilitas di Bloemfontein Afrika Selatan. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas melalui lokakarya, dengan pemberdayaan pelatihan, keterampilan, dan diberikan layanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Belum terpenuhi interaksi antar pendamping dan penyandang disabilitas, sumber daya manusia untuk mendampingi penyandang disabilitas masih minim, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan belum terpenuhi. Maka pemberdayaan yang dilakukan belum membawa penyandang disabilitas mencapai tahapan keberhasilan (Tinta et al., 2020). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pemberdayaan yang dilakukan. Salah satunya program *Care Sheltered Workshop* sebagai tujuan dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan melaksanakan pengembangan individu penyandang disabilitas melalui pemberdayaan masyarakat (kemensos.go.id, 2021). Sayangnya, hasil program tersebut di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan para penyandang disabilitas mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Begitupula minimnya regulasi dalam menciptakan hak penyandang disabilitas, untuk mendukung program pemberdayaan yang dilakukan seperti sumber dana modal yang kurang, dan pemberdayaan dilakukan hanya ketika ada dana dari pemerintah (Syobah, 2018).

Hal lain yang berbeda terjadi di Kabupaten Magetan, yaitu telah dilakukan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberdayaan penyandang disabilitas di desa tersebut, telah dikatakan berhasil dikarenakan dalam informasi yang diperoleh pemberdayaan telah mencapai penjualan produk UMKM unggulan bernama Batik Ciprat Langitan buatan penyandang disabilitas di Desa Simbatan Jawa Timur terkenal hingga ASEAN (Syarifah, 2022). Berbeda dengan

pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya, baik ditataran internasional maupun nasional yang belum maksimal. Awalnya pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan suatu komunitas atau *sheltered Workshop Peduli* Sambung Roso. Di dalam *sheltered* tersebut, terkumpul warga penyandang disabilitas intelektual. Anggota KSM diberi beberapa pelatihan, karya, dan hasil produksi yang paling utama dimiliki dan diminati anak-anak disabilitas di KSM Sambung Roso adalah batik ciprat. KSM Sambung Roso dibentuk ketika Kemensos membuat program pada tahun 2015. Di KSM Sambung Roso terdapat susunan organisasi pendamping penyandang disabilitas berjumlah 6 orang, diantaranya terdapat ketua, administrasi, pemasaran, promosi dan pemasaran, produksi, dan hubungan masyarakat. Pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Jika dilihat dari sudut pandang sebelah mata pemberdayaan tersebut sudah berhasil.

Sayangnya, masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas yang lebih merata. Kurangnya teknologi informasi pemasaran di era digital saat ini, menjadikan produk di KSM Sambung Roso dikenal oleh masyarakat luas luar daerah. Masih minimnya dalam mengakses berbagai program pemerintah, menjadikan sumber daya kurang responsif (Mulyati et al., 2019). Dari pernyataan tersebut, pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas jika dilihat dalam perspektif *community governance* berkembang dalam tiga kapasitas yang dikemukakan oleh Innes dan Booher dalam Sudarmo, (2015 : 170-171), pertama terdapat *social capital* yang terdiri dari *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*, kedua adalah *organizational resources*, dan kapasitas terakhir adalah *human capital*. Menurut Kushandajajni (2014) *community governance* berperan aktif sebagai tanggung jawab dan komitmen yang dilakukan oleh komunitas, sangat memberikan pengaruh yang dominan dimana faktor-faktor keberhasilan pelayanan dari *community governance* untuk komunitas.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh KSM Sambung Roso jika dilihat dalam perspektif *community governance* dengan tiga kapasitas. Dalam kegiatan pembuatan batik ciprat sendiri sarana dan prasarana masih kurang untuk mendukung keberhasilan menjalankan produksi batik ciprat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di KSM Sambung Roso. Banyak faktor sumber daya yang belum terpenuhi seperti mesin, materi, tempat untuk beristirahat yang nyaman ramah disabilitas belum terpenuhi, pemasaran produk yang masih minim teknologi informasi seperti di era digital saat ini. Kapasitas yang terakhir dalam melihat proses pemberdayaan dalam perspektif *community governance* adalah *human capital*, dimana hal ini sebagai kapasitas untuk mencapai target tujuan komunitas melalui sumber daya manusia atau para pendamping yang mendampingi penyandang disabilitas. Sumber daya manusia atau tenaga pendamping dalam KSM

Sambung Roso, tidak keseluruhan menyandang status dengan pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan khusus untuk disabilitas. Dimana beberapa pendamping masih menyandang status hanya lulusan SMP, SMA, S1 Pendidikan Elektro, SMK, dan hanya 2 yang memiliki lulusan guru pendidikan luar biasa. Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh KSM Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam perspektif *community governance*. Kajian terkait *community governance* tidak mampu terlepas tentang *governance* itu sendiri, sebagai kajian melalui tata kelola pemerintahan karena *community governance* mengacu pada tata kelola urusan publik dalam komunitas seperti adanya masyarakat dan pemerintah yang tidak bisa mendominasi peran keseluruhannya (Duan, 2015). Sesuai yang dikemukakan oleh Innes dan Booher dalam Sudarmo (2015 : 170-171) adanya suatu komunitas bisa berjalan dengan baik ketika memiliki kapasitas dengan *community governace* di dalamnya, bisa menjalankan sesuai kapaitas yang sesuai pada penempatannya. Kapasitas *community governance* sendiri merupakan interaksi yang dilakukan dalam menuju tujuan yang akan dilakukan seperti Social Capita, Organizational Resources, Human Capital. Beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa *Community governance* sebagai bentuk-bentuk pemecahan masalah yang ada pada pemerintah yang bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk jaringan *bonding*, *bridging* dan *linking* pada komunitas (Sudarmo, 2019).

Adapun dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, hal. 74) bahwa pemberdayaan memiliki tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh World Bank dalam Mardikanto (2010 : 34) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu tindakanyang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dapat diketahui dalam penjelasan pada bab sebelumnya, di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang cukup tinggi akan penyandang disabilitas. Melihat sudah banyak apresiasi dan kemandirian ekonomi dari penyandang disabilitas yang diberdayakan, akan tetapi dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pasti memiliki hambatan di setiap prosesnya atau bahkan apakah memang sudah bisa dikatakan berhasil. pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas melalui tiga tahap pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007, hal. 74 yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam perspektif *community governace* melalui kapasitas menurut Innes dan Booher dalam Sudarmo (2015 : 170-171) yaitu human

capital, organizational resources, dan social capital. Dengan demikian, maka judul dari penelitian ini yakni pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam perspektif *Community governance*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat dan menganalisis *community governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen atau arsip terkait, literatur, Undang-Undang. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, hal. 74) dimana terdapat 3 tahapan proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, tahapan pendayaan. Selain itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KSM Sambung Roso menggunakan perspektif *community governance*, dimana menggunakan teori Innes dan Booher dalam Sudarmo (2015 : 170-171) Kapasitas *community governance* sendiri merupakan interaksi yang dilakukan dalam menuju tujuan yang akan dilakukan seperti, *Social capital (bonding social capital, bridging social capital dan linking social capital)*, *Organizational resources*, dan *Human capital*. Dalam penelitian ini, Informan di pilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu yaitu *purposive sampling* merupakan suatu kriteria dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019: 289). Adanya suatu pertimbangan tertentu yang mana artinya seorang peneliti anggap tahu dan mengerti tentang topik penelitian dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso. Informan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Ketua dan Bendahara KSM Sambung Roso, anggota pendamping KSM Sambung Roso, penyandang disabilitas KSM Sambung Roso, pihak Dinas Sosial Magetan, Perangkat Desa Simbatan, masyarakat Desa Simbatan. Data yang telah diperoleh kemudian diuji dengan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis dengan analisis data interaktif memiliki kemiripan dengan penjelasan analisis data yang dijelaskan Sugiyono karena memaparkan beberapa unsur. Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014) sendiri dalam melakukan analisis data terdapat pada tiga unsur didalamnya yaitu, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Simbatan Kecamatan Nguntoronadi kabupaten

Menurut oleh Jim Ife dan Frank Toserio (2008 : 501) pemberdayaan adalah suatu bentuk dari perubahan radikal yang dapat melakukan staruktur-struktur dengan rencana dominasi yang, untuk perubahan masyarakat yang perlu diberdayakan agar menghasilkan peningkatan hidup yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat KSM Sambung Roso dalam penelitian ini dilihat dari 3 tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, haI. 74) bahwa pemberdayan memiliki tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap-tahap tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran

Tahap ini merupakan tahap awal dari sebuah pemberdayaan, dalam tahap penyadaran masyarakat diberikan sosialisasi agar mereka memiliki motivasi untuk keluar dari kemiskinannya. Tahap penyadaran kaitannya dengan penerangan untuk kehidupan yang hendak dicapai, agar lebih berpotensi serta memunculkan keinginan untuk diberdayakan muncul dari dirinya sendiri. Kegiatan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KSM Sambung Roso pada tahap penyadaran yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Tahap Penyadaran

No	Kegiatan Penyadaran	Apa yang disadarkan	Pelaksanaan
1.	Pendataan	Proses kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan menyadarkan hak-hak yang mereka miliki, dan tentang pentingnya bermasyarakat.	Dilakukan satu kali sebelum menjadi anggota penyandang disabilitas di KSM Sambung Roso.

<p>2. Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat terkait pertemuan di Balai Desa Simbatan dan diberikan ruang untuk disabilitas dalam acara di Desa seperti hajatan agar masyarakat terbiasa dengan kehadiran mereka</p>	<p>Kegiatan selanjutnya adalah menyadarkan masyarakat desa dalam kegiatan pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu memberikan ruang kepada anak disabilitas untuk diikut sertakan dalam kegiatan di Desa.</p>	<p>Dilakukan dua kali awal mula berdirinya ksm Sambung Roso, sebelum masyarakat di desa simbatan mengetahui secara jelas pemberdayaan batik ciprat penyandang disabilitas di desa simbatan</p>
<p>3. Pertemuan rutin ketua KSM Sambung Roso dan anggota penyandang disabilitas</p>	<p>Penyadaran tentang pentingnya saling peduli satu sama lain dan saling menolong antar anggota penyandang disabilitas yang tergabung di KSM Sambung Roso</p>	<p>Dilakukan seminggu sekali oleh ketua dan anggota penyandang disabilitas di KSM Sambung Roso</p>

Sumber: Data Olah Peneliti

2. Tahap pengkapasitasan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk dapat meningkatkan *soft skill* dari pada masyarakat. Tahap pemberdayaan dengan pengkapasitasan atau yang disebut dengan “*capacity building*” proses ini berkaitan dengan kapasitas yang harus dimiliki ketika adanya pemberdayaan, yaitu nilai, manusia, dan organisasi. Kegiatan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KSM Sambung Roso pada tahap penyadaran yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat Tahap Pengkapasitasan

No	Kegiatan Pengkapasitasan	Deskripsi kegiatan	Pelaksanaan
1.	Proses Pelatihan Pemasangan Alat Pembuatan Batik di KSM Sambung Roso	Kegiatan pelatihan pengenalan bagaimana kain batik sebelu digunakan, dan pengenalan pengarahen tentang alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan batik ciprat	Selama 6 bulan pada tahun 2016
2.	Pelatihan Pencampuran Pewarna Batik	Kegiatan pelatihan pencmpuran batik dilakuakn kepada anak disabilitas ringan dengan memberikan edukasi cara menghasilkan pewarna untuk batik.	Dilakukan kurang lebih 4 bulan awal tahun 2016
3.	Pelatihan Proses Pembuatan Batik dan Mewarna Batik di KSM Sambung Roso	kegiatan pelatihan ini hanya diberikan edukasi cara mewarnai kain secara merata tanpa ada kain yang masih terlihat dan tanpa warna	Dilakukan 3 bulan awal KSM memproduksi batik di tahun 2016
4.	Pelatihan Proses Menggambar Batik Canting Tulis di KSM Sambung Roso	Kegiatan pelatihan pembuatan batik tulis canting merupakan keterampilan baru kegiatan KSM Sambung Roso setelah batik ciprat, dimana anak-anak awalnya diberi kain dan kemudian tinggal mempertebal sketsa yang digambar sesuai dengan kreatifitasnya.	Dilakuakn setiap bulan sekali dan tergantung tingkat pemesanan
5.	Pelatihan menjahit di PKBM Al Mustofa Madiun	Kegiatan pelatihan menjahit hanya diberikan beebrrpa penyandang disabilitas tuna grahta	Dilakukan sekali tahun 2021
6.	Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Gorang-Gareng	Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan anak-anak disabilitas yang tergabung di KSM Sambung Roso	Dilakukan 1 bulan sekali
7.	Pelatihan Membuat PKK	Pelatihan membuat dengan PKK dan Dinas Koperasi untuk menukar pikiran dan ide kreatifitasi membuat	Dilakukan 6 bulan sekali

dan Dinas
 Koperasi

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 8. | Pelatihan
Desain Batik
dan Marketing
oleh Kemensos | Penguatan untuk desain batik yang
lebih berpotensi dan pelatihan tentang
memasarkan produk batik | Setahun
sekali
tergantung
event. |
|----|---|--|---|

Sumber: Data Olah Peneliti

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang sesuai dengan *skill*, yang dimiliki melalui pelatihan berkelanjutan yang dilanjutkan dengan memberikan peran yang lebih besar secara berskala sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kegiatan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KSM Sambung Roso pada tahap penyadaran yakni sebagai berikut :

Tabel 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Tahap Pendayaan

No.	Kegiatan Pendayaan	Deskripsi Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pemberian bantuan renovasi tempat pembuatan batik ciprat KSM Sambung Roso dari Universits Merdeka Madiun	Kegiatannya adalah pengabdian masyarakat dari UNMER Madiun dimana terdapat 3 termin, dan kerjasama dimulai pada tahun 2020 hingga berakhir di tahun 2022.	Setahun sekali dengan rujukan proposal melalui Desa Simbatan
2.	Pemberian modal dana dan pelatihan kegiatan kerajinan membatik oleh BBRSG UPT Temanggung	Bantuan dana sebesar 2.500 juta untuk awal berdirinya KSM Sambung Roso di Simbatan untuk membeli peralatan membatik dan pemberian pelatihan kerajian tangan oleh komunitas BBRSG UPT Temanggung.	Dilakukan awal berdirinya KSM Sambung tahun 2015 selama 7 hari di Temanggung

3. Penyerahan Bantuan Atensi untuk Lansia dan disabilitas, dimana kegiatannya adalah penyerahan bantuan alat dan bahan pembuatan batik.

Sumber: Data Olah Peneliti

B. Proses Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso dalam Perspektif *Community Governance*

Komunitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu banyak dilakukan, tetapi tidak semua komunitas mampu melakukan *community governance* secara benar. Untuk bisa mencapai *community governance* dalam komunitas diperlukan adanya kemampuan dan kapasitas yang harus diselenggarakan dan dimiliki pada komunitas yang dijalankan. Seperti yang dikemukakan oleh Innes dan Booher dalam Sudarmo (2015 : 170-171) yang menyatakan bahwa adanya suatu komunitas bisa berjalan dengan baik ketika memiliki kapasitas dengan *community governance* di dalamnya. Dimana kapasitas tersebut terdiri dari 3 aspek, yaitu Social Capital (*Bonding Social Capital*, *Bridging Social Capital*, dan *Linking Social Capital*), *Organizational Resources*, *Human Capital*. Kapasitas *community governance* tersebut menjelaskan tujuan seperti berikut :

1. *Social capital* menurut Grafton, Sanginga, Kamugisa dan Martin dalam (Sudarmo, 2015) dapat dilakukan diantaranya adalah *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital*. Dimana *social capital* merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai tindakan kolektif dari *community governance* untuk pengisi daya dari sumber daya yang lebih ber-*power* melalui komunitas yang ada pada lingkungan sekitar dimana ada beberapa masyarakat yang kurang berdaya untuk diberdayakan (Colleman, 1998). Jadi, *social capital* dalam konteks struktural sebagai jaringan
 - a. Lebih lanjut penjelasan tentang bentuk *social capital* yaitu :
 - 1) *Bonding social capital*, merujuk pada ikatan yang sama dalam organisasi atau komunitas, dimana kesatuan dan kekompakan pada kelompok organisasi dan komunitas sama-sama merasakan dari segi keadaan, tempat, bahkan kepentingan-kepentingan tujuan yang hendak dicapai.
 - 2) *Bridging social capital*, merupakan jaringan-jaringan yang dipergunakan dalam organisasi atau komunitas, dalam menjalin

hubungan melalui organisasi, komunitas, dan kelompok lain dalam menghasilkan kolaborasi pemerintah.

- 3) *Linking social capital*, adalah kemampuan dalam organisasi, komunitas, dan kelompok dalam melakukan hubungan dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa. Jaringan hubungan yang dilakukan dengan kelompok yang lebih kuat dan kekuasaannya sangat berpengaruh dalam kemajuan di komunitasnya, seperti hubungan dengan institusi formal pemerintah.
2. *Organizational resources*, dalam kapasitas *community governance* ini merujuk pada organisasi dalam mendukung kegiatan. Sama halnya yang dikemukakan oleh Hariandja (2007) bahwa sumber daya manusia sebagai aspek yang utama di organisasi dikarenakan manusia bisa memilah teknolog yang akan digunakan, manusia bisa mencari modal yang tepat digunakan, dan manusia bisa memelihara dan melakukan perawatan organisasi agar mampu berjalan, kemudian sumber untuk keberhasilan organisasi dapat melalui sumber daya bukan manusia seperti modal, uang, dan teknologi. Menurut Wursanto (2005 : 53-54) menyebutkan ada 2 jenis daya kerja (sumber daya organisasi) dalam mendukung unsur-unsur organisasi mencapai tujuan
3. *Human capital*, sebagai kapasitas *community governance* dalam faktor yang sangat penting kaitannya untuk tujuan organisasi, komunitas yang ada. Menurut Hasibun (2006: 10) manusia berperan sangat aktif untuk keberjalanan organisasi, sebagai pelaku, perencana, dan aktor untuk mewujudkan tujuan pada organisasi. Sumber daya manusia sangat dominan ketika posisi di organisasi dan komunitas yang dijalankan, karena sebagai modal besar dalam kegiatan organisasi yang dijalankan manusia memiliki akan, pikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan, ketrampilan dan motivasi di segala kegiatan yang dijalankan.

C. 3 Tahap Proses Pemberdayana Masyarakat Penyandang Disabilitas Oleh KSM Sambung Roso

1. Tahapan penyadaran, dilakukan beberapa kegiatan seperti:
 - a. Pendataan, dengan aspek-aspek *community governance social capital* atas keperdulian pemerintah desa dan adanya kepercayaan kepada anggota pendamping KSM Sambung Roso sehingga memunculkan (*bonding social capital*, dan *linking social capital*). Peran *organizational resources*, tersedianya sumber daya manusia untuk memfasilitasi terbentuknya KSM Sambung Roso, kemudian

human capital dari kemampuan keterampilan dan jiwa sosial yang tinggi para pendamping.

- b. Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat terkait pertemuan di Balai Desa Simbatan dan diberikan ruang untuk disabilitas dalam acara di Desa, seperti hajatan agar masyarakat terbiasa dengan kehadiran mereka. kepedulian masyarakat dan pemerintah desa untuk penyandang disabilitas (*bonding social capital* dan *linking social capital*), untuk *organizational resources* dalam proses ini tersedianya sumber daya manusia dari pihak pemerintah desa dan beberapa masyarakat dalam mengendalikan penyandang disabilitas, kemampuan ini berperan pada pendamping KSM Sambung Roso (*human capital*).
 - c. Pertemuan rutin ketua KSM Sambung Roso dan anggota penyandang disabilitas, proses ini memunculkan aspek *community governance* berupa *social capital* dari *bonding social capital* dimana adanya tujuan dan kepercayaan dari penyandang disabilitas dan pendamping KSM Sambung Roso. Dalam *organizational resources* sendiri terdapat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memberi motivasi penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan KSM Sambung Roso. Hal ini tercermin dari *human capital* KSM Sambung Roso daya keterampilan.
2. Tahapan pengkapasitasan, dilakukan beberapa kegiatan seperti:
- a. Proses pengarahan pelatihan pemasangan alat pembuatan batik ciprat di KSM Sambung Roso. Aspek *community governance* dari *social capital* berupa *bonding social capital* tentang kebersamaan melalui pelatihan, dan *organizational resources* berupa tersedianya alat dan bahan saat proses pemberdayaan, serta *human capital* dari KSM Sambung Roso berupa kemampuan dan keterampilan (*human capital*).
 - b. Pelatihan Pencampuran Pewarna Batik oleh Pendamping di KSM Sambung Roso. Aspek *community governance* dari *social capital* berupa *bonding social capital* tentang adanya bimbingan dari pendamping dalam menciptakan skill-skill yang dimiliki anak penyandang disabilitas sesuai karakteristiknya. Kemudian *organizational resources*, tersedianya alat dan bahan dalam proses pemberdayaan, dan adanya pendampingan dengan jiwa sosial yang tinggi melalui strategi inovasi dari pendamping KSM Sambung Roso (*human capital*).
 - c. Pelatihan proses pembuatan batik dan mewarna batik di KSM Sambung Roso. Aspek *community governance social capital*

- berupa *bonding social capital* tentang keuletan dan kesabaran anggota pendamping dalam memberikan motivasi. Adanya *organizational resources* tersedianya alat bahan untuk proses pemberdayaan. Inovasi dan pelatihan ide kreatif pengembangan motif untuk kreatifitas penyandang disabilitas (*human capital*).
- d. Pelatihan proses menggambar batik canting tulis di KSM Sambung Roso. Aspek *community governance* berupa social capital berupa *bonding social capital* dari kesabaran dan pelatihan bersama. Adanya alat dan bahan membatik memudahkan pemberdayaan yang dilakukan (*organizational resources*). Kemampuan yang dimiliki pendamping keterampilan pengembangan ide inovasi dan teknik membatik (*human capital*).
 - e. Pelatihan menjahit di PKBM Al Mustofa Madiun. Aspek *community governance* berupa *bridging social capital* adanya bimbingan dan pendampingan pelatihan melalui komunitas lain. Tersedianya peralatan menjahit sesuai kebutuhan proses pemberdayaan (*organizational resources*). Belum adanya kemampuan pendamping terkait pelatihan menjahit (*human capital*).
 - f. Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Gorang-Gareng. Aspek *community governance social capital* berupa *linking social capital* karena adanya kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi dari pihak pemerintah, tentu dalam hal ini adanya (*organizational resources*) sumber daya manusia pendamping KSM Sambung Roso mencari pihak-pihak untuk berkontribusi pada pemberdayaan yang dilakukan. Pendamping sendiri membantu pada proses kegiatan pemeriksaan (*human capital*).
 - g. Pelatihan membatik dari PKK dan Dinas Koperasi. Aspek *community governance* berupa *bridging social capital* dan *linking social capital* karena terdapat semangat kebersamaan dan dukungan pihak swasta maupun pihak pemerintah. Dari hal tersebut, memberikan pengaruh semakin tersedianya sumber daya manusia untuk pengembangan (*organizational resources*), hal ini menghasilkan inovasi menciptakan ide-ide motif batik kepada penyandang disabilitas maupun pendamping (*human capital*).
 - h. Pelatihan desain batik dan marketing oleh Kemensos. Aspek *community governance social capital* berupa *bridging social capital* dan *linking social capital* karena pemenuhan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam mewujudkan ide-ide membatik.

Peran *organizational resource* sendiri tersedianya pengembangan sumber daya manusia dari Pihak berkuasa.

3. Tahapan pendayaan, dilakukan beberapa kegiatan seperti :
 - a. Pemberian bantuan renovasi tempat pembuatan batik ciprat KSM Sambung Roso dari Universitas Merdeka Madiun. Aspek *community governance social capital* berupa *bridging social capital* adanya semangat kebersamaan dan kepercayaan. Tersedianya sumber daya manusia adanya bantuan dan pendampingan pemenuhan kebutuhan (*organizational resources*). Kemampuan mencari kerja sama hanya mampu dilakukan oleh Ketua pendamping KSM Sambung Roso saja (*human capital*).
 - b. Pemberian modal dana dan pelatihan kegiatan kerajinan keset, menjahit, dan kerajinan membatik oleh KBBRSG UPT Temanggung. Aspek *community governance social capital* berupa *bridging social capital* adanya pelatihan dan kepedulian memberikan bantuan, dan tersedianya sumber daya manusia dalam membantu pengembangan kemampuan membatik dan pemberian bantuan dana untuk alat bahan membatik (*organizational resources*). Pendampingan yang dilakukan setiap hari untuk pengembangan ketrampilan yang didapatkan kemudian disalurkan kepada anak-anak penyandang disabilitas (*human capital*).
 - c. Penyerahan Bantuan Atensi untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas dari Kemensos. Aspek *community governance linking social capital* berupa kepedulian pihak Pemerintah. Tersedianya alat dan bahan untuk membatik dan penyaluran bantuan dana untuk pendukung perlengkapan kebutuhan KSM Sambung Roso setiap tahun.

Penutup

1. Terlaksananya prose pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KSM Sambung Roso dalam perspektif *community governance* ini dapat dilihat dari :
 - a. Modal sosial (*social capital*) yang dapat dilihat dari:
 - 1) *Bonding social capital*, adanya tujuan yang sama dari masyarakat Desa Simbatan, pendamping dan anggota penyandang disabilitas dalam memandirikan ekonomi penyandang disabilitas.
 - 2) *Bridging social capital*. Yaitu terjalin hubungan kerjasama dengan komunitas dan pihak-pihak yang berkuasa seperti, perguruan tinggi, sekolah, komunitas BBRSG UPT Kartini Temanggung, dll yang diwujudkan dengan adanya pemberian bantuan-bantuan melalui KSM Sambung Roso.

- 3) *Linking social capital*, yaitu terbentuknya jaringan-jaringan dengan kelompok yang berkuasa seperti Pemerintah Desa, Kemensos, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, dan Puskesmas. Jaringan-jaringan yang telah dilakukan tersebut, diwujudkan berupa adanya pertukaran informasi terkait pelatihan-pelatihan, pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana proses pemberdayaan masyarakat.
- b. Tersedianya sumberdaya organisasi (*organizational resources*) baik berupa dana, bahan makanan, peralatan pendukung membuat, bantuan renovasi lumbung desa untuk kegiatan produksi batik ciprat ksm sambung roso, dll sehingga dapat di manfaatkan untuk mendukung terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh KSM Sambung Roso.
- c. *Human capital* yang dimiliki oleh KSM Sambung Roso, dapat dilihat dari :
 - 1) Kemampuan (keahlian) dari sumberdaya manusia yang dimiliki oleh KSM Sambung Roso masih terbatas karena pendidikan beberapa anggota pendamping hanya sebatas SMP, SMK, SMA, dan teknik elektro.
 - 2) Adanya kemampuan dalam membuat ide dan inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu, pelatihan teknik-teknik membuat dan menabung dari pemotongan setengah gaji untuk pembelian barang.
2. Namun, dalam KSM Sambung Roso masih ditemukan kelemahan dari human capital KSM Sambung Roso dimana terlihat menjalankan hanya bergantung dari Ketua KSM Sambung Roso saja. Keterbatasan keahlian ini beberapa kegiatan juga masih bergantung dengan kelompok lain.
3. Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas KSM Sambung Roso yang telah melaksanakan 3 tahapan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *community governance* yang dilakukan kepada penyandang disabilitas. Namun, pada aspek *community governance* berupa kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia (*human capital*) yang dimiliki KSM Sambung Roso masih terbatas.

Adapun saran pada penelitian yang dilakukan, nantinya harus adanya kolaborasi Perangkat Desa dengan ketua KSM Sambung Roso agar menciptakan kegiatan terbaru di desa setempat seperti arisan setiap bulan mengusung tema tentang disabilitas. Hal ini karena masih ditemukan kurangnya kepedulian masyarakat desa dengan anak-anak disabilitas. Perlu dilakukan kembali penguatan kepada pendamping dengan penyaluran pelatihan keluar komunitas, dan adanya pembukaan rekrutmen untuk masyarakat sekitar sebagai pendamping KSM Sambung Roso. Dimana seringkali alat bahan masih terbatas. *Organizational resources* masih terbatas, kapasitas keterampilan yang tinggi hanya dimiliki oleh ketua pendamping dan 1 anggota pendamping KSM Sambung Roso. Disamping itu,

human capital dalam memberikan keterampilan motif kepada anak-anak disabilitas dengan kualitas yang dimiliki masih terbatas dan monoton. Maka bisa dilakukan penguatan anggota pendamping melakukan pelatihan dengan komunitas lain dari luar daerah.

Referensi

- Berlinski, S., Duryea, S., & Perez-Vincent, S. M. (2021). Prevalence and Correlates of Disability in Latin America and The Caribbean: Evidence from 8 National Censuses. *Plos One*, 16(10), e0258825. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258825>
- Bowles, S. & Gintis, H. 2022, Social Capital and Community Governance “, *The Economic Journal*, 112 (483).
- Charlton, J. I. (2000). *Nothing about Us without Us: Disability, Oppression and Empowerment*. University of California Press
- Diono, A. (2014). Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data & Informasi Dan Kesehatan, Semester 2*, 19– 24
- Fitri Syarifah. (2022, April 18). Dulu Dikucilkan, Kini Penyandang Disabilitas di Desa Simbatan Terkenal karena Membuat Batik Ciprat Langitan. *Liputan6.com*; <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4941578/dulu-dikucilkan-kinipenyandang-disabilitas-di-desa-simbatan-terkenal-karena-membuat-batikciprat-langitan>
- G20 Indonesia 2022 | Presidensi G20 Indonesia Angkat Isu Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. (2022). *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-g20/4035/presidensi-g20-indonesia-angkat-isu-kesempatan-kerja-bagi-penyandangdisabilitas?lang=1>.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta : Grasindo
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- International Labour Organization. (2013). *Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia*. Dirujuk dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-/ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Miles, M., B., Hubberman, A., M., Saldana (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebooks, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Mulyati, T., Rohmatiah, A., & Amadi, D. N. (2019). *Pelatihan Dan Pendampingan Penyandang Disabilitas Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten*

- Magetan. Jurnal Terapan Abdimas, 4(2), 187.
<https://doi.org/10.25273/jta.v4i2.4844>
- Rajamohan, D. S., & Saranya Devi, E. (2020). Roles And Responsibility Of The National Institute For The Empowerment Of Person With Visual Disabilities In India: A Study. *International Journal of Management*, 11(9).
- Sheppard-Jones, K., & Lasley-Bibbs, V. (2021). Public Health, Work, and Disability. In *Public Health Perspectives on Disability* (pp. 321–339). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_15
- Steyn, H., Tinta, N., & Vermaas, J. (2020). Barriers experienced by people with disabilities participating in income-generating activities. A case of a sheltered workshop in Bloemfontein, South Africa. *African Journal of Disability*, 9(1), 1-9
- Sudarmo. (2019). Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for sex Workers through Social Capital. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2): 117:136
- Sudarmo. 2015. Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance. Surakarta : UNS Press
- Susilawati, I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong” Di Kabupaten Ponorogo. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 14(2), 224-242.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *Nuansa*, Vol. 15 No. 2, 15(December), 251–272.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <http://undocs.org/en/A/RES/70/1>
- World Bank. (2022). *The World by Income and Region*. World Bank. <https://datatopics.worldbank.org/worlddevelopment-indicators/the-worldbyincome-and-region.htm>
- WrihatnoIo, R. R., & Riant, N.D. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wursanto. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : ANDI.